

Mulai Tingkat DPRD Kabupaten Kota Hingga DPR RI Fraksi NasDem Gelar Workshop Nasional Bahas Revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Makassar



Realitarakyat.com – Seluruh Anggota DPRD mulai tingkat Kabupaten/Kota hingga DPR RI dari Fraksi Partai NasDem menggelar workshop nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara tersebut akan digelar selama empat hari 24-27 September 2021.

Kegiatan tersebut diketahui dalam rangka memperkuat peran anggota legislatif khususnya dari Partai NasDem.

Anggota DPRD dari 10 provinsi mulai dari Jawa Timur, Maluku Utara, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo mengikuti acara tersebut.

Acara workshop dibuka dan dipimpin langsung Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.

Dalam sambutannya, Ali yang juga ketua Fraksi NasDem DPR RI mengatakan workshop diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan berkelanjutan di setiap daerah.

Tak itu saja, dalam forum ini juga membahas mengenai berbagai permasalahan legislatif di tingkat daerah serta berupaya mencari solusi terbaiknya.

“Karena itu, saya berharap dalam workshop ini dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anggota DPRD sehingga kemudian nanti bisa menjadi masukan bagi Fraksi NasDem DPR RI untuk kita buat kajian, manakala bisa menjadi titik pijak untuk menjawab keresahan-keresahan anggota DPRD di daerah,” ujar Ali dalam keterangan yang diterima, Minggu (26/9/2021).

Diakui Ali, satu poin yang menjadi pembahasan dalam workshop tersebut adalah revisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Bagi Ali, aturan tersebut menempatkan anggota DPRD sebagai pejabat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah atau eksekutif daerah.

Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur anggota DPRD menjalankan peran legislatif sebagai perwakilan rakyat.

Politikus asal Palu, Sulawesi Tengah ini yakin lahirnya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 ini merupakan keresahan seluruh anggota DPRD dari semua partai politik.

Sebab, semangat dari Perpres itu adalah bagaimana menempatkan anggota DPRD sama dengan ASN, sehingga fasilitas yang diberikan pun sama dengan ASN.

“Dari cara pandang yang kami bangun, ini tidak bijak kalau anggota DPRD disamakan dengan ASN. Kalau ASN ditunjuk untuk mendapat suatu jabatan, kalau anggota DPRD dipilih. Nah, di situ ada fungsi representasi, kemudian ada aspirasi,” jelasnya.

Tentunya, kata Ali, anggota DPRD harus diberikan fasilitas dan kewenangan yang cukup untuk memenuhi representasi dan aspirasi rakyat itu sendiri.

“Kita bisa berharap untuk mengoptimalkan perjuangan terhadap aspirasi rakyat yang diwakili DPRD,” ujarnya.

Karena DPRD terbatas secara fasilitas dan kewenangan, sehingga sulit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, tidak bisa pemerintah melihat DPRD dan ASN sama.

Atas dasar itu, ungkap Ali, Fraksi NasDem mengusulkan perbaikan beleid Standar Harga Satuan Regional tersebut demi terciptanya sistem yang menunjang fungsi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai legislator daerah. (Ilm)

